

PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMINIMALSIR KONFLIK ANTAR KELOMPOK DI DESA TOMPASO BARU SATU KECAMATAN TOMPASO BARU KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Chindy Claudya Moningka¹
Frans C Singkoh²
Fanley N Pangemanan³

Abstrak

Peran pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alenia IV negara Indonesia mempunyai tujuan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Dalam menjaga kermanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat, peran pemerintah sangat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik. Peran pemerintah harus dilakukan demi menuju pada suatu perubahan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Jaminan kermanan dari pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat memberikan rasa aman serta kemakmuran bagi masyarakat.

Kata Kunci: Peranan, Pemerintah, Konflik, Antar Kelompok.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Peran pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alenia IV negara Indonesia mempunyai tujuan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Dalam menjaga kewan dan ketertiban dilindungi masyarakat, peran pemerintah sangat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik. Peran pemerintah harus dilakukan demi menuju pada suatu perubahan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Jaminan kewan dari pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat memberikan rasa aman serta kemakmuran bagi masyarakat.

Saat ini persoalan konflik termasuk masalah yang menyangkut kepentingan publik (keamanan), dimana dalam memahami hal tersebut peran pemerintah dibutuhkan dalam merespon segala persoalan publik khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban suatu daerah. Kemampuan akan peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan keamanan publik menjadi titik tekan kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan konflik yang setiap waktu

dapat terjadi. Maka dari itu peran pemerintah mutlak diperlukan dalam penanganan konflik yang saat ini masi sering terjadi. Konflik sering dimaknai berupa benturan seperti perbedaan pendapat, persaingan atau pertentangan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, serta antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Konflik bisa muncul dalam berbagai latar belakang seperti permasalahan antar individu maupun kelompok, baik yang menyangkut ekonomi, politik ataupun sosial budaya.

Masalah konflik merupakan fenomena yang seakan menjadi biasa dalam masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan kondisi negara Indonesia yang serba multi, dengan segala macam kemajemukan dan heterogenitas. Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari multi etnis dan multi budaya, bahkan dewasa ini Indonesia telah menjadi negara yang multi partai dalam sistem politiknya. Kondisi yang demikian itu tidak dapat menghindarkan masyarakatnya dari timbulnya berbagai bentuk konflik.

Konflik diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Pengertian ini harus dibedakan dengan kekerasan, yaitu sesuatu yang meliputi tindakan, perkataan, sikap atau berbagai struktur dan sistem yang mengakibatkan kerusakan secara fisik, mental, sosial dan lingkungan dan atau menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh.

Oleh karena itu dengan melihat konflik antar kelompok yang hingga kini masih terjadi bahkan sangat meresahkan masyarakat, peneliti ingin

mendalami bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi konflik antar kelompok di Desa Tompasso Baru I Kecamatan Tompasso Baru. Sebab menurut penulis sampai saat ini pemerintah setempat sepertinya kurang memperhatikan masalah ini. Realitasnya perkelahian antar kelompok pemuda dalam desa masih sering terjadi.

Tinjauan Pustaka

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.

Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”. Maurice Duverger, (2010: 103) berpendapat bahwa Istilah “peran” (*role*) dipilih secara baik karena diya menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional.

Menurut Maurice Duverger, (2010: 102) bahwa “Peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-

anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status”. Sedangkan Stoetzel dalam Rafael Raga Maran, (2007: 50) mengatakan bahwa “Status adalah pola perilaku kolektif yang secara normal bisa diharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain, sedangkan peranan adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang”.

Dari paparan diatas bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, (2006: 213) Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian peran dan peranan diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, menurut Husaini Usman (2009:78), metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingka laku manusia dalam situasi tertentu menurut prespektif peneliti sendiri. Yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang peran pemerintah dalam mengatasi konflik antar kelompok di kecamatan tompaso baru kabupaten minahasa selatan. Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara

dengan informan terkait fokus penelitian sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu. Data didapatkan dengan penelitian langsung ke lokasi penelitian.

Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan di bahas hasil penelitian yang sudah di lakukan di Desa Tompaso Baru Satu Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan, dalam bab ini juga nantinya akan dilakukan analisis data terhadap semua data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Adapun analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu untuk melihat bagaimana peran pemerintah desa dalam meminimalisir konflik antar kelompok dengan tetap mengacu pada hasil interpretasi data dan informasi sesuai dengan fokus penelitian. Informasi merupakan data yang di olah menjadi jawaban dari setiap pertanyaan yang nantinya dapat dijadikan proses untuk pengambilan keputusan. Seperti halnya wawancara yang sudah dilakukan di lokasi penelitian mengenai peran pemerintah dalam meminimalisir konflik antar kelompok.

Peneliti tidak hanya melakukan wawancara kepada aparat Desa Tompaso Baru Satu tetapi juga peneliti melakukan observasi kepada masyarakat untuk melihat serta mencari tau apakah masyarakat dilibatkan dalam penyelesaian persoalan konflik, hal ini dilakukan peneliti untuk melihat serta dapat menganalisa dari setiap jawaban atau setiap informasi dari para responden yang sudah di wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan maka peneliti mendapatkan jawaban serta informasi yang kemudian dirangkum semua hasil

wawancara tersebut kemudian di analisa semua hasil wawancara yang sudah dilakukan kepada aparat dan masyarakat Desa Tompaso Baru Satu Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan.

Interaksi dan Komunikasi merupakan aktifitas manusia yang sangat penting baik dalam kehidupan berorganisasi maupun dalam kehidupan social dalam keseharian di sadari atau tidak komunikasi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Untuk menjalin hubungan yang harmonis diperlukan rasa kemanusiaan yang akarb dan saling pengertian sesama anggota masyarakat. Hal tu biasa terjadi karena adanya komunikasi yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dengan komunikasi kita dapat meminimalisir konflik yang ada dalam kehidupan sehari-hari, baik itu konflik antar individu, antar kelompok maupun konflik antar organisasi.

Musyawarah untuk mufakat pada dasarnya salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila sila keempat. Tujuan tersendiri adanya musyawarah untuk mufakat ialah membentuk rakyat yang harmonis, erat akan kekeluargaan, dan semangat kebersamaan. Musyawarah dalam menyelesaikan masalah dapat dikatakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Konflik atau perkara dalam penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap konflik atau perkara hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian di antara pihak yang berkonflik untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Koordinasi Pemerintah Desa dengan instansi mitra pemerintah lain

merupakan suatu keharusan dalam meminimalisir konflik. Terciptanya tujuan pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan tentunya merupakan hasil dari koordinasi yang baik antar lembaga/ mitra pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian Kepala Desa Tompaso Baru Satu bahkan pihak kepolisian Tompaso Baru selalu memberikan arahan terkait konflik antar kelompok di desa tompaso baru satu.

Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial-politik. Konflik banyak dijumpai dan seringkali terjadi dan kurang cepat diselesaikan, dalam penanganan konflik haruslah terselesaikan dengan cepat agar tidak mempengaruhi pelaku konflik atau orang yang menjadi korban konflik itu sendiri. Alasan itulah yang menyebabkan pemerintah selalu mencari faktor-faktor yang menyebabkan konflik itu terjadi, penanganan dan pengelolaan yang tepat dapat meminimalisir timbulnya konflik besar baik antar individu maupun antar kelompok.

Kesimpulan

1. Pemerintah Desa Tompaso Baru Satu dalam meminimalisir konflik salah satunya menjembatani pertemuan pihak-pihak yang bersitegang dengan mengadakan forum yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat serta aparat kepolisian.
2. Musyawarah adalah salah satu startegi yang dilakukan pemerintah desa Tompaso Baru Satu dalam meminimalisir konflik antar kelompok.

3. Pemerintah desa telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian dalam menjaga keamanan di Tompaso Baru Satu.
4. Minuman keras masih menjadi salah satu pemicu utama terjadinya konflik antar kelompok

Saran

1. Diharapkan agar dalam pemerintah Desa lebih memberikan sosialisasi akan pentingnya saling menjaga keamanan dan ketertiban.
2. Dalam meminimalisir konflik diharapkan pemerintah desa membatasi penjualan minuman keras.
3. Untuk meminimalisir terjadinya konflik yang besar disarankan untuk adanya koordinasi pemerintah desa dan kepolisian supaya setiap malam mengontrol kondisi seputaran perkumpulan kelompok-kelompok yang sering menimbulkan keributan.
4. Mengadakan pendidikan karakter untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna membangun karakter pribadi sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.
5. Lebih di tingkatkan kegiatan-kegiatan Kemasyarakatan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2012). *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Adam Ibrahim I. Wijaya. (2014). *Perilaku Organisasi*. Jakarta :Sinar Baru Algesindo.
- Duverger, Maurice. (2010). *Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grapindo Persada
- Husaini Usman, (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Ed.2.

Cetakan ketiga. Jakarta. Bumi Aksara.

Koentjaraningrat. (2003). *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. (2009). *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Pickering, Peg. (2005). *How to Manage Conflict: Kiat Menangani Konflik (edisi ketiga)*. Jakarta: Esensi Erlangga

Putra,P A.A. (2009). *Meretas Perdamaian Dalam Konflik Pilkada Langsung*. Yogyakarta:Gava Media

Rafael Raga Maran, (2007) *Pengantar Logika*, Jakarta:Grasindo.

Raipenza. (2008). *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Karim Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. (2008). *Perilaku Organisasi Edisi (12 ed)*. Jakarta: Salemba Empat.

Soerjono Soekanto. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grapindo Persada)

Susan, Novri. (2009). *Sosiologi Konflik&Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta : Kencana.

Wulan Sari, Dewi. (2009). *Sosiologi (Konsep dan teori)*. Bandung : PT. Refika Aditama

Winardi. (2007). *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandung: Pustaka Setia.

_____ (2004). *Manajemen Perilaku Organisasi*. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.